

BAB V

KESIMPULAN IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Pada bagian ini dikemukakan beberapa kesimpulan, implikasi dan rekomendasi yang didasarkan atas hasil penelitian dan analisis data, terutama yang berkenaan dengan pengelolaan sistem angka kredit jabatan fungsional guru sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah dasar Kabupaten Kepulauan Riau.

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, yaitu tentang bagaimana pengelolaan sistem angka kredit jabatan guru dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah dasar, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa pengelolaan yang dilaksanakan telah menunjukkan beberapa keunggulan, namun masih menampakkan kelemahan-kelemahan yang harus disempurnakan lagi. Kesempurnaan dan kelemahan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Dalam perencanaan yang disusun telah memperlihatkan hal-hal yang positif yaitu terhadap perencanaan sistem angka kredit yang perlu ditetapkan, berkenaan dengan kebutuhan guru untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan, proses belajar mengajar, dan penunjang proses belajar mengajar. Begitu juga yang berkenaan dengan menentukan pengorganisasian guru, penentuan fasilitas administrasi, dan dana. Sedangkan kelemahan terletak pada perencanaan tentang kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, baik yang menyangkut dengan kegiatan yang akan dilaksanakan maupun sarana yang dipergunakan.

2. Pada kegiatan pelaksanaan, kesempurnaan terlihat pada pengkoordinasian yang dilakukan pengelola terhadap pihak terkait dan penilaian prestasi kerja guru dalam kaitan angka kredit jabatan guru. Sedangkan kelemahan terletak pada relevansi pelaksanaan dengan program sistem angka kredit sebagai upaya meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar terutama pada kegiatan pengembangan profesi.
3. Berkaitan dengan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan sistem angka kredit dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan (diklat), proses belajar mengajar, pengembangan profesi, dan penunjang proses belajar mengajar, keunggulan terlihat pada pelaksana (personal) pengawas serta pelaksanaan pengawasan yang telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan kegiatan tersebut. Kelemahan masih terjadi pada jumlah tenaga pengawas TK/SD dari Kandepdikbud Kecamatan yang masih kurang, jumlah sekolah tidak seimbang dengan jumlah pengawas yang ada, sehingga kegiatan pembinaan proses belajar mengajar yang dilakukan guru belum terlaksana dengan baik.
4. Dari dampak pengelolaan sistem angka kredit jabatan guru terletak pada kontribusi yang positif terhadap peningkatan kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar yang dalam hal ini peningkatan kemampuan dalam membuat program pengajaran, melaksanakan proses belajar mengajar, dan mengevaluasi pengajaran.

B. Implikasi Temuan Penelitian

1. Pada aspek perencanaan yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pengelola memperlihatkan kelemahan-kelemahan. Diantara kelemahan-kelemahan tersebut adalah tentang kegiatan pengembangan profesi yang dirancang belum sempurna, begitu juga perencanaan dana kegiatan yang masih belum menjamin kegiatan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Berkenaan dengan hal itu bila ini tetap terjadi, maka upaya untuk meningkatkan kemampuan mengajar guru melalui sistem angka kredit jabatan guru akan menemukan kesulitan untuk diwujudkan. Kemampuan dalam melaksanakan tugas proses belajar merupakan aspek yang perlu dimiliki guru dalam rangka meningkatkan efektivitas interaksi belajar mengajar di kelas.

2. Pada pelaksanaan, kelemahan dapat dilihat pada relevansi pelaksanaan dengan program yang belum baik serta penilaian prestasi kerja guru yang berkaitan dengan sistem angka kredit jabatan guru yang belum dapat dilaksanakan seobyektif mungkin.

Berkenaan dengan hal itu bila program yang disusun kurang sesuai dengan pelaksanaan dan penilaian prestasi kerja guru masih belum dapat dilakukan seobyektif mungkin, maka keterkaitan dalam mencapai tujuan juga akan terganggu.

3. Pada kegiatan pengawasan kelemahannya dapat dilihat pada kegiatan pembinaan proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh pengawas TK /SD yang belum dapat terlaksana dengan baik.

Berkenaan dengan hal itu bila pembinaan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh pengawas TK/SD belum dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan mempengaruhi upaya peningkatan kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar.

4. Dampak pengelolaan sistem angka kredit jabatan guru terhadap peningkatan kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar dinilai positif. Berkenaan dengan itu dampak positif ini akan mendukung terhadap peningkatan efektivitas interaksi belajar mengajar di kelas. Proses belajar mengajar yang efektif ini akan mewujudkan hasil belajar siswa yang meningkat.

C. Rekomendasi

Dari temuan dan bahasan di atas, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi mengenai strategi pengelolaan yang mungkin ditempuh oleh praktisi satuan pendidikan di sekolah, maupun pembinaan oleh pihak-pihak terkait yang berwenang di daerah penelitian ini, yang perlu dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Kepala Sekolah sebagai Pengelola

Keberhasilan pengelolaan ditentukan banyak aspek, oleh karena itu dalam penelitian ini diungkapkan aspek-aspek pengelolaan sistem angka kredit jabatan guru yang diupayakan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar yang ditandai dengan kemampuan dalam merencanakan program belajar mengajar, melaksanakan proses belajar mengajar, menilai kemajuan proses belajar mengajar, dan menguasai bahan pelajaran. Apabila salah satu aspek tidak dikelola dengan baik tentu akan mengganggu kelangsungan aspek yang lainnya. Seyogyanya penyusunan rencana pengelolaan sistem angka kredit yang baik selalu memperhatikan aspek-aspek dalam program sistem tersebut.

Kegiatan manajemen yang efektif dapat dijadikan contoh pengelolaan sistem angka kredit jabatan guru sebagai upaya meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar di Kabupaten Kepulauan Riau. Untuk itu, kepala sekolah sebagai pengelola harus memperhatikan kegiatan pengelolaan yang baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan sistem angka kredit jabatan guru sebagai upaya meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar.

Kepala sekolah seyogyanya telah dapat membuat perencanaan yang memuat aspek-aspek apa saja yang harus ada dalam perencanaan sistem angka kredit jabatan fungsional guru sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar.

Perencanaan kegiatan mempedomani pelaksanaan program yang terdiri dari pendidikan/ pelatihan, proses belajar mengajar, pengembangan profesi, dan penunjang proses belajar mengajar. Dengan demikian kepala sekolah sebagai pengelola dalam merencanakan sistem angka kredit jabatan guru sebagai upaya meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar dapat memulai dengan melihat tentang kebutuhan guru. Perencanaan kebutuhan dibuat lengkap dengan menentukan kebutuhan guru untuk mengikuti pendidikan/pelatihan, proses belajar mengajar, pengembangan profesi, dan penunjang proses belajar mengajar. Kedua, perencanaan dengan mengorganisasikan guru-guru yang akan mengikuti/ melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Ketiga, perencanaan tentang fasilitas administrasi yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan sistem tersebut. Keempat adalah perencanaan tentang biaya yang berkaitan dengan penentuan sumber dana dan besarnya dana yang dipergunakan untuk melaksanakan sistem tersebut.

Pelaksanaan sistem angka kredit jabatan guru adalah untuk merealisasikan program yang telah disusun, agar berjalan dengan baik, maka yang perlu diperhatikan adalah :

Koordinasi dengan pihak terkait merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan sistem tersebut. Koordinasi dapat dilakukan antara lain dengan Kandeptikbud Kabupaten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, Kandeptikbud Kecamatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kandeptikbud Kecamatan, dan pihak Gugus Sekolah. Kedua, adalah kerelevansian pelaksanaan dengan program sebaiknya menjadi perhatian kepala sekolah, sebab tanpa adanya kerelevansian ini sangat sulit untuk mencapai hasil yang baik.

Pengawasan yang dilakukan guna mengawasi dan untuk mengetahui keberhasilan sistem angka kredit jabatan guru yang telah dikelola. Maka oleh karena itu yang perlu diperhatikan adalah : penentuan pelaksana pengawasan dan proses maupun hasil tidak menyimpang dari tujuan yang akan dicapai. Pengawasan juga akan

memberi perhatian pada kegiatan pembinaan, khususnya pembinaan terhadap guru yang melakukan proses belajar mengajar.

2. Guru

Guru perlu meningkatkan kreativitas dalam melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalnya. Mereka diharapkan banyak belajar untuk mengurangi ketertinggalan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini guru-guru dapat memanfaatkan sumber-sumber belajar seperti perpustakaan yang ada di daerah, mengunjungi sekolah-sekolah yang telah menunjukkan prestasi kerja yang baik, banyak membaca buku-buku yang ada di sekolah, dan berdiskusi bersama rekan-rekan guru.

2. Kandepdikbud Kabupaten

Pihak Kandepdikbud Kabupaten memiliki fungsi untuk menilai dan penetapan angka kredit jabatan guru. Kelemahan selama ini adalah masih terjadi keterlambatan proses penilaian dan penetapan angka kredit guru yang disebabkan kurangnya tenaga /staf yang melakukan tugas ini. Untuk itu petugas yang khusus menangani tugas tersebut perlu diadakan sehingga tidak perlu memikirkan tugas administrasi yang lain.

3. Kandepdikbud Kecamatan/ Gugus Sekolah

Kandepdikbud Kecamatan/ Gugus Sekolah melakukan pembinaan dengan mengadakan penataran-penataran bidang studi. Untuk lebih meningkatkan fungsinya perlu dilakukan penambahan frekuensi kegiatan dan peningkatan kualitas tenaga pembina. Sedangkan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh pengawas perlu menambahkan tenaga pengawas TK/SD yang dapat mengimbangi jumlah sekolah dasar yang ada yang tentunya dari guru/

kepala SD yang telah memiliki pengalaman yang memadai tentang proses belajar mengajar.

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / Kecamatan

Menurut PP No. 65 Tahun 1951, pengelolaan bidang kepegawaian, keuangan dan material (perlengkapan sekolah dasar dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas dan K.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II Kabupaten Kepulauan Riau adalah perpanjangan tangan dan bagian dari Pemerintah Daerah Tingkat I Riau yang melaksanakan tugas tersebut. Berkenaan dengan hal itu seyogyanya pihak Pemda (Dinas P dan K) menganggarkan biaya pelaksanaan sistem angka kredit jabatan guru secara nyata dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) pemerintah daerah, karena salah satu penyebab kurang lancarnya pelaksanaan sistem tersebut adalah masih kurangnya kesempatan bagi guru untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dan lemahnya dana penunjang serta fasilitas sekolah khususnya yang diperlukan untuk melaksanakan proses belajar mengajar.

